

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH PADA WILAYAH PEMERIKSAAN BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Yohanes Binur Haryanto<sup>\*1</sup>, Masdar Masud<sup>2</sup>, Rustan DM<sup>3</sup>**

<sup>\*1,2,3</sup>Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail : <sup>\*1</sup>yobin.manik@gmail.com , <sup>2</sup>masdar.mas'ud@umi.ac.id , <sup>3</sup>rustandm66@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Pengendalian Internal & Good Corporate Governance, menggunakan pendekatan kuantitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai responden, data sekunder berupa jurnal, buku dan lain-lainnya. Jumlah sampel yang digunakan berjumlah 50 sampel dan teknik pengelolaan analisis yang digunakan yaitu SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan jumlah sampel yang diolah sebanyak 50 responden di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan, penerapan sistem pengendalian internal dan good corporate governance berpengaruh positif terhadap tata kelola keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan good corporate governance secara simultan berpengaruh terhadap tata kelola keuangan daerah pada Wilayah Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Good Corporate Governance Dan Tata Kelola Keuangan.

**Abstract**

*This study aims to analyze the Internal Control System & Good Corporate Governance by using a quantitative approach. This study used primary data by distributing questionnaires to BPK representatives of South Sulawesi Province as respondents and secondary data from journals, books, and others. The number of samples used is 50 samples and I utilized SPSS for data processing.*

*The results show that the implementation of the internal control system and good corporate governance has a positive effect on the local government corporate governance. The internal control system and good corporate governance simultaneously affects local government corporate governance in the examination area of the BPK Representative for South Sulawesi Province.*

*Keywords : Internal Control System, Good Corporate Governance And Local Government.*

**PENDAHULUAN**

Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tuntutan publik akan transparansi, efisiensi pemerintah dalam pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara semakin meningkat. Fokus masyarakat tidak hanya pada pertanggungjawaban penggunaan dana APBN/APBD yang dicantumkan dalam laporan keuangan pemerintah, tetapi juga pada alokasi penggunaan atau penyusunan anggarannya.

Masyarakat beropini sebagai ukuran akuntabilitas pemerintah, menjamin pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bebas korupsi. Faktanya, tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas ada tidaknya korupsi dalam entitas. Sebelum memeriksa BPK sebagai auditor eksternal, pemerintah telah mengembangkan sistem pengendalian internal yang bertujuan antara

lain untuk mengendalikan, mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memitigasi penyimpangan.

Berbagai kecurangan atau kasus korupsi yang umumnya terjadi dilakukan karena adanya peluang atau peluang. Peluang ini dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi karena lemahnya sistem pengendalian intern dan ketidaksetiaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh individu. Sistem pengendalian intern adalah sistem yang terdiri dari berbagai elemen dan tidak terbatas pada akuntansi dan keuangan, tetapi mencakup pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan personel, dll.

Jika sistem pengendalian internal organisasi lemah, individu cenderung melihat ini sebagai peluang untuk melakukan kecurangan akuntansi. Sebaliknya, jika sistem pengendalian internal perusahaan kuat, kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi akan berkurang. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi atau memprediksi kecurangan akuntansi. Sedangkan loyalitas adalah perilaku yang terkait dengan kesepakatan implisit sukarela oleh seseorang yang bekerja dalam komunitas yang saling bergantung untuk mematuhi prinsip-prinsip etika universal dalam mencapai tujuan individu dan kolektif (Coughlan, 2005). Jika individu dalam suatu organisasi memiliki loyalitas yang tinggi, maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi akan semakin kecil. Sebaliknya, jika individu dengan loyalitas rendah, kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin tinggi.

Menurut KPMG Fraud, Survei Suap dan Korupsi 2018 yang dilakukan di Australia dan Selandia Baru pada tahun 2019, penyebab kecurangan adalah pengendalian internal yang buruk, yang berjumlah 28% responden, kemudian melewati sistem pengendalian internal yang ada sebesar 19%. Sehingga hingga 42% kasus fraud terdeteksi karena pengendalian internal. Berdasarkan hal tersebut, pengendalian internal sangat penting keberadaan dan penerapannya dalam mendeteksi kecurangan, termasuk korupsi.

Penyebab utama dari maraknya terjadinya tindak kecurangan korupsi antara lain adalah kurangnya pengendalian internal pada sistem pengelolaan organisasi. Menurut Arens et al (2014) kecurangan terjadi karena terdapat lemahnya kontrol yang dilakukan oleh pihak internal organisasi, serta kecurangan dapat dilakukan karena adanya tekanan, kesempatan dan sikap.

Berdasarkan riset hasil pemeriksaan semester IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan) dan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Semester II Tahun 2020. Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Menemukan 5.070 kasus temuan yang diantaranya 2.026 (29%) temuan ketidakpatuhan terhadap aturan undang-undang senilai Rp12,64 Triliun, dan 1.956 (28%) temuan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), 2.988 (43,88%) temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektivan.

Berdasarkan data di atas diantaranya termasuk IHPS Semester 2 Tahun 2020 dan LHP pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan diketahui bahwa terdapat 586 temuan dengan nilai Rp205.475.814.381,18 yang terdiri dari 275 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan nilai Rp201.971.992.609,35,30 temuan Kelemahan Pengendalian Internal, dan 7 temuan ketidakefisienan, ketidakefektivan, dan ketidakekonomisan dengan nilai Rp3.503.821.771,83.

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui: operasi yang efisien dan efektif, laporan keuangan yang andal, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian intern dalam penelitian ini menekankan pada perencanaan dan pengendalian yang telah disusun dan berdampak pada pengambilan keputusan. Unsur-unsur sistem pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pengawasan pengawasan.

Tuonakotta (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal dirancang dan diimplementasikan untuk menghadapi risiko bisnis dan penipuan. Menurut Soliman (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan dicegah melalui pengendalian internal dengan mengurangi stres

dan peluang serta meningkatkan moral individu di setiap level dalam organisasi. Ketika suatu perusahaan atau organisasi menerapkan pengendalian internal yang baik, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan atau organisasi tersebut memiliki tingkat risiko fraud yang rendah, dan potensi fraud dapat dikurangi secara dini.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai standar bagi pemeriksa untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan Kode Etik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai inti integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga berwenang memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, mempertimbangkan penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan. mengenai kerugian negara.

Hasil pelaporan BPK disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya. Hasil pemeriksaan juga diserahkan kepada pemerintah dan pimpinan partai yang disaring untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka BPK wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sistem pengendalian internal, ada konsep tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang tidak kurang penting. GCG muncul karena adanya benturan kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen yang mendorong agen untuk memberikan informasi yang tidak benar kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Penyajian informasi yang tidak tepat akan berdampak pada kebenaran informasi yang dibutuhkan manajer. Untuk itu, penerapan GCG merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja.

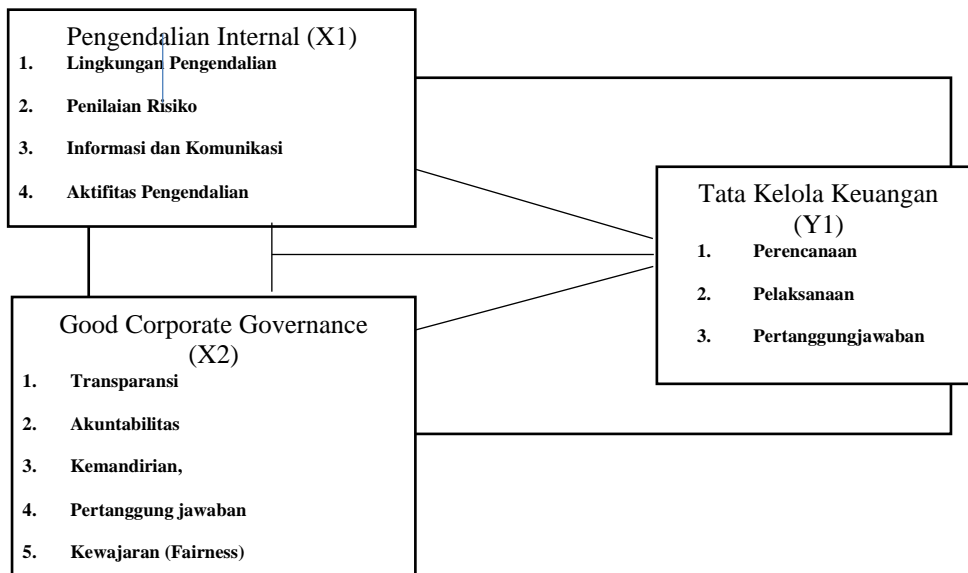
Sistem pengendalian intern dan tata kelola yang baik merupakan dua indikator penting dari sistem tata kelola keuangan. Sistem tata kelola adalah mekanisme organisasi yang baik dalam mengelola sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis atau produktif dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran guna mencapai tujuan organisasi (Syakhroza, 2003). Sistem tata kelola mencakup sistem hukum, aturan dan regulasi yang mengendalikan organisasi (Gillan & Starks dalam Baker & Quere, 2014). BPK merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dapat menunjuk pemeriksa dan/atau tenaga ahli dan/atau pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Pemeriksa BPK adalah Pelaksana BPK yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Tenaga ahli dan/atau pemeriksa di luar BPK dapat berupa perorangan atau organisasi di luar BPK.

Sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik merupakan dua indikator penting dari sistem tata kelola keuangan. Sistem tata kelola adalah mekanisme organisasi yang baik dalam mengelola sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis atau produktif dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran guna mencapai tujuan organisasi (Syakhroza, 2003). Sistem tata kelola mencakup sistem hukum, aturan dan regulasi yang mengendalikan organisasi (Gillan & Starks dalam Baker & Quere, 2014)., BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan, perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan sehingga dengan penelitian ini dapat dijadikan dasar bahwa sistem pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pengelolaan keuangan daerah pada wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam penelitian ini berfokus pada wilayah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Variabel X1 adalah Sistem Pengendalian Internal dan Variabel X2 adalah Good Corporate Governance dan Variabel Y adalah Tata Kelola Keuangan Daerah yang pada wilayah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dapat disusun dengan konsep kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian**



**METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif, Penelitian kausal bermanfaat guna untuk menganalisa bagaimana variabel terhadap variabel lainnya (Umar,2003), penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah efektivitas pengendalian internal dan good corporate governance dapat berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah pada wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Penelitian ini menekankan bentuk pengukuran menggunakan angka dengan analisis data prosedur statistik dengan analisis regresi linear berganda, koefesien determinasi, uji t dan uji f menggunakan bantuan SPSS.

**HASIL PENELITIAN**

Uji-T atau uji parsial digunakan untuk memperkuat keyakinan penulis terhadap kesimpulan yang diperoleh setelah menghitung analisis korelasi linier. Analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui cukup atau tidaknya bukti-bukti yang ada dengan besaran 5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Jika pengaruh variabel dependen individu adalah 5%, maka hipotesis diterima. Jika lebih besar dari 5% hipotesis ditolak. Adapun hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. Hasil Perhitungan Regresi**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.560	1.333		.420	.676
	Pengendalian Internal	.086	.025	.325	3.495	.001
	Good Corporate Governance	.628	.091	.641	6.888	.000

a. Dependent Variable: Tata Kelola Keuangan Daerah

Sumber: data primer diolah SPSS V.25 (2021)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial yang telah dilakukan di atas dapat diketahui bahwa pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri dari sistem pengendalian internal (X1) dan good corporate governance (X2) terhadap tata kelola keuangan daerah (Y) akan dijelaskan sebagai berikut :

- a) Hipotesis (H1) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap tata kelola keuangan daerah di SAI Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini diperoleh dari hasil analisis regresi yaitu thitung X1 adalah 3,495 dan ttabel adalah 2008 dimana data melihat nilai t-hitung > tabel. Sedangkan nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (5%) dimana nilai sig variabel X1 adalah 0,001 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif secara parsial. terhadap pencegahan kecurangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
- b) Hipotesis (H2) diterima bahwa good corporate governance berpengaruh positif terhadap tata kelola keuangan daerah di BPK Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh dari hasil analisis regresi yaitu t-hitung X2 sebesar 6,888 dan ttabel adalah tahun 2008 dimana data lihat nilai thitung > tabel. Sedangkan nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (5%) dimana nilai sig variabel X2 adalah 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa good corporate governance berpengaruh positif secara parsial. terhadap pencegahan kecurangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh model atau persamaan sebagai berikut :

$$Y = 0.560 + 0.086X1 + 0.628X2$$

Hasil persamaan di atas menunjukkan bahwa dari koefisien regresi terdapat hubungan yang positif antara pengaruh sistem pengendalian internal dan good corporate governance terhadap tata kelola keuangan daerah Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa :

- a) Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 0.560, artinya bahwa jika tidak ada perubahan pada pengaruh sistem pengendalian internal dan good corporate governance terhadap tata kelola keuangan daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.560 atau sebesar 56.0%.
- b) Nilai regresi ( $\beta_1$ ) variabel sistem pengendalian internal (X1) sebesar 0.086 artinya bahwa jika terjadi peningkatan pengaruh sistem pengendalian internal sebesar 1%,

maka tata kelola keuangan daerah dapat ditingkatkan sebesar 0.086 atau sebesar 8.6%.

- c) Nilai regresi ( $\beta_2$ ) variabel good corporate governance (X2) sebesar 0.628, artinya bahwa jika terjadi peningkatan good corporate governance sebesar 1%, maka tata kelola keuangan daerah dapat ditingkatkan sebesar 62.8%.

**Uji Simultan (Uji F)**

Untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam mengestimasi nilai sebenarnya, digunakan uji F-statistik. Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat dengan benar atau tidak dan uji model yang digunakan sudah sesuai atau tidak. Pengujian dilakukan dengan perbandingan dengan kriteria dimana jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai P (signifikansi)  $\leq 0,05$  maka model yang digunakan baik (fit) dan jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau nilai P (signifikansi)  $> 0,05$  maka model bekas Tidak baik (tidak sesuai). Hasil pengujian simultan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. Hasil Uji F (Simultan)**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	218.316	2	109.158	129.023	.000 <sup>b</sup>
	Residual	39.764	47	.846		
	Total	258.080	49			

a. Dependent Variable: Tata Kelolah Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Good Corporate Governance, Pengendalian Internal

Sumber: data primer diolah SPSS V.25 (2021)

Sesuai hasil analisis regresi di atas dapat dilihat  $F_{hitung}$  adalah sebesar 129.023 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 3.19 dengan derajat kebebasan (df) yaitu  $df_1 = 3$  dan  $df_2 = 47 = 49$  pada tingkat signifikansi 0,05 (5%). Dapat dilihat bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $129.023 > 3.19$ ), maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak yang berarti bahwa sistem pengendalian internal dan good corporate governance secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap tata kelola keuangan daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

**Uji Koefisien Determinasi**

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengetahui persentase kontribusi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini melihat sejauh mana variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.920 <sup>a</sup>	.846	.839	.920

a. Predictors: (Constant), Good Corporate Governance, Pengendalian Internal

Sumber: data primer diolah SPSS V.25 (2021)

Berdasarkan hasil output spss pada tabel di atas diperoleh nilai R sebesar 0.920 atau sebesar 92.0% dimana nilai ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan good corporate governance mempunyai hubungan yang kuat dalam pencegahan kecurangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan nilai koefisien determinasi R<sup>2</sup> sebesar 0.846 atau sebesar 84.6%, Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 84.6% tata kelola keuangan daerah dapat diatasi dengan pengaruh sistem pengendalian internal dan good corporate governance dan sisanya sebesar 15.4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tata kelola keuangan daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Sistem pengendalian internal adalah prosedur yang disusun untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen perusahaan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan telah tercapai. Sistem pengendalian internal dapat disebut juga sebagai rencana organisasi yang dirancang oleh manajemen perusahaan untuk memenuhi lima tujuan yaitu memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan handal, menjaga asset, menaati persyaratan hukum, efisiensi operasional dan mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan.

Terdapat lima komponen yang ada dalam sistem pengendalian internal diantaranya pengawasan, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, menilai resiko dan lingkungan pengendalian. Komponen yang ada dalam sistem pengendalian internal harus ditingkatkan dan dievaluasi sehingga bisa dilihat perkembangan penerapannya dalam suatu perusahaan sehingga fungsi pengendalian internal dapat diterapkan secara efektif dalam suatu perusahaan. Jika suatu organisasi sudah bisa menerapkan sistem pengendalian internal Apabila suatu organisasi telah mampu melaksanakan pengendalian internal dengan efektif maka tujuan dan sasaran suatu organisasi akan lebih mudah dicapai.

Dari penelitian yang dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat bahwa sistem pengendalian internal sendiri telah berjalan cukup baik di lingkungan instansi. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang sangat setuju terhadap penerapan sistem pengendalian internal dalam tata kelola

keuangan daerah dalam lingkungan instansi. Indikator yang paling banyak dilakukan yaitu aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian dengan melihat dari distribusi responden.

Namun, dalam penerapan sistem pengendalian internal tidak semuanya berjalan 100%. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti :

- a. Pegawai yang cenderung kurang memahami sistem yang berlaku dalam instansi sehingga sistem pengendalian internal tidak terlaksana secara maksimal.
- b. Penilaian terhadap resiko yang kurang maksimal.
- c. Pimpinan yang tidak tegas dalam penerapan rancangan pengendalian yang sudah direncanakan sebelumnya.

Sistem pengendalian internal sendiri dilaksanakan sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 yang memiliki fungsi dalam menjaga pelaksanaan tugas dalam suatu instansi agar sesuai dengan bagian masing-masing sehingga penyimpangan atau tindak kecurangan dapat dicegah atau di minimalisir sejak dini. Tindak kecurangan bisa saja terjadi dan dilakukan oleh oknum pegawai yang tidak bertanggung jawab jika sistem pengendalian internal tidak dijalankan dengan baik. Dalam teori keagenan juga dijelaskan bahwa principal dalam memberikan kewenangan kepada agen tentang pengambilan keputusan dimana kepentingan lebih diutamakan untuk mengoptimalkan keuntungan sehingga dapat meminimalkan beban perusahaan.

Kasus kecurangan akibat tata kelola keuangan yang kurang baik yang terjadi tidak hanya jenis korupsi saja, namun ada beberapa jenis kecurangan lainnya seperti manipulasi laporan keuangan yang dimana sering dilakukan beberapa pihak. Dalam siaran Pers. BPK R.I (2013) mengenai sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh BPK R.I mengungkapkan bahwa kasus-kasus kelemahan pengendalian internal tergolong atas kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan kelemahan pada struktur pengendalian internal.

Untuk dapat memaksimalkan tata kelola keuangan yang baik agar tidak terjadi tindak kecurangan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, maka pimpinan harus mampu merencanakan dan mengevaluasi secara konsisten sistem pengendalian internal pada instansi BPK agar penerapannya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jika pengendalian internal tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan maka proses pengendalian internal tidak akan berarti terhadap pencegahan kecurangan. Maka dari itu, pengendalian internal harus dilakukan sesuai dengan kebijakan organisasi yang sudah dirancang sedemikian rupa dan diawasi dengan baik agar tindak kecurangan seperti penyajian laporan keuangan yang salah dan peyalahgunaan wewenang bisa daitasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif bisa memberikan pengaruh yang positif terhadap tata kelola keuangan daerah khususnya pada instansi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.**

Good corporate governance berpengaruh positif dalam tata kelola keuangan daerah di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju bahwa good corporate governance telah berjalan dengan semestinya dan dapat meningkatkan tata kelola



keuangan yang baik di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Good corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham. Pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan dan pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang memiliki kaitan dengan hak-hak dan kewajiban atau dengan kata lain suatu sistem yang dapat mengendalikan perusahaan.

Good corporate governance memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Good corporate governance memiliki peran dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar bisa mencapai suatu keseimbangan antara kekuatan atau kewenangan yang diperlukan oleh suatu perusahaan demi menjamin keberlangsungan dan eksistensi serta tanggungjawab kepada stakeholder. Good corporate governance memiliki tujuan penting dalam menciptakan nilai tambah bagi stakeholder dimana good corporate governance diperlukan dalam rangka menciptakan transparansi, akuntabilitas, kewajaran, kemandirian, efisiensi tanggungjawab demi terciptanya kondisi yang diharapkan.

Menurut keputusan Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M/2002, corporate governance merupakan suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Konsep stakeholder dimana good corporate governance di BUMN terdapat 4 poin sesuai dengan penjelasan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dimana poin tersebut menjelaskan bahwa :

1. BUMN perlu menerapkan budaya korporasi dan profesionalisme mealui pembenahan pengurusan dan pengawasan dimana penerapan tersebut harus berdasarkan prinsip dan tata kelola perusahaan yang baik atau stakeholder dimana good corporate governance.
2. Penerapan prinsip pengelolaan dan pengawasan BUMN sangat penting terbukti dari pengalaman saat keterpurukan ekonomi diberbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance secara konsisten.
3. Sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dapat meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.
4. Mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator dengan lembaga pemerintah sebagai regulator serta menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham atau pemilik modal BUMN.

Penerapan peran good corporate governance sesuai dengan penjelasan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN telah berjalan dengan baik walaupun pelaksanaannya belum 100% maksimal. Hal ini dikarenakan ketegasan dan dalam penerapan sistem good corporate governance masih kurang dalam instansi sehingga terkadang masih ada oknum yang melakukan tindak kecurangan akibat pengelolaan keuangan yang kurang. Adapun alasan dari beberapa kasus kecurangan yang terjadi adalah karena adanya desakan dan

kesempatan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang sangat banyak. Dengan demikian prinsip dalam teori good corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, kemandirian, tanggung jawab serta kewajaran tidak diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori keagenan dimana kewenangan atas pengambilan keputusan lebih mengutamakan kepentingan demi mengoptimalkan keuntungan perusahaan sehingga cenderung melakukan penghindaran dan pelanggaran.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan selaku pihak yang bertindak dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara sangat penting dalam menerapkan prinsip good corporate, governance demi menghindari terjadinya kecurangan dalam melakukan pemeriksaan keuangan. BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan haru menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian, kewajaran serta tanggungjawab dala melaksanakan tugasnya agar dapat memberikan kepercayaan bagi publik. Peran pegawai dalam menjalankan tugasnya sangat penting dan harus selalu berdampingan dengan prinsip-prinsip good corporate governance agar bisa berjalan secara bersama-sama dan tujuan instansi dapat tercapai dengan baik.

Untuk dapat mencegah tindak kecurangan maka perlu diterapkan sistem pengelola keuangan yang baik pada perusahaan maupun organisasi sektor publik dengan menerapkan good corporate governance. Pelaksanaan tata kelola perusahaan ataupun organisasi intansi sektor publik dapat mencegah bahkan mendeteksi kecurangan. Good corporate governance akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga pengelolaan keuangan akan memperkecil potensi terjadinya kecurangan. Penerapan good corporate governance dapat mendorong kinerja berbagai sumber daya manusia secara efisien dan menghasilkan nilai eknomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat secara keseluruhan.

### **Pengaruh Secara Simultan Sistem Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.**

Berdasarkan hasil uji data yang dilakukan menunjukkan bahwa secara bersamaan atau simultan variabel sistem pengendalian internal dan good corporate governance berpengaruh terhadap variabel tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan sistem pengendalian internal yang cukup baik di lingkungan instansi. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang sangat setuju terhadap penerapan sistem pengendalian internal dalam tata kelola keuangan daerah dalam lingkungan instansi. Indikator yang paling banyak dilakukan yaitu aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian dengan melihat dari dintribusi responden.

Sedangkan untuk penerapan good corporate governance dapat dilihat dari tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju bahwa good corporate governance telah berjalan dengan semestinya dan dapat digunakan dan diterapkan dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat meminimalkan tingkat terjadinya kecurangan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Good corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham. Pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan dan pemegang

kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang memiliki kaitan dengan hak-hak dan kewajiban atau dengan kata lain suatu sistem yang dapat mengendalikan perusahaan.

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik, pimpinan harus mampu merencanakan dan mengevaluasi secara konsisten sistem pengendalian internal pada intansi BPK agar penerapannya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jika pengendalian internal tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan maka proses pengendalian internal tidak akan berarti terhadap tata kelola keuangan daerah. Selain itu, good corporate governance dan pelaksanaan tata kelola perusahaan ataupun organisasi intansi sektor publik juga sangat penting dalam sistem tata kelola keuangan daerah. Good corporate governance akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga pengelolaan keuangan akan memperkecil potensi terjadinya kecurangan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan jumlah sampel yang diolah hingga 50 responden di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tata kelola keuangan daerah pada wilayah pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif bisa memberikan pengaruh yang positif terhadap tata kelola keuangan daerah.
2. Good corporate governance berpengaruh positif terhadap tata kelola keuangan daerah pada wilayah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Good corporate governance memiliki tujuan penting dalam menciptakan nilai tambah bagi stakeholder dimana good corporate governance diperlukan dalam rangka menciptakan transparansi, akuntabilitas, kewajaran, kemandirian, efisiensi tanggungjawab demi terciptanya kondisi yang diharapkan.
3. Sistem pengendalian internal dan good corporate governance secara simultan berpengaruh terhadap tata kelola keuangan daerah pada kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Penerapan sistem pengendalian internal dan good corporate governance secara bersamaan dalam suatu perusahaan ataupun sektor publik dapat memberikan pengaruh yang positif dan mampu menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan meminimalisir serta mendeteksi tingkat kecurangan sejak dini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abiola, J. (2013). The Impact of information and communication technology on internal control's prevention and *detection* of fraud (Doctoral Dissertation). Faculty of Business & Law, De Montfort University. Diakses dari <https://www.dora.dmu.ac.uk/handle/2086/9496>.
- ACFE. (2014). Report to the Nations on occupational fraud and abuse. Diakses dari <http://www.acfe.com/rtn2016.aspx>.
- Albrecht, S. W., & Albrecht, C. O. (2004). Fraud examination and prevention. Australia: Thomson, South-Western.
- Amrizal. (2004). Pencegahan dan pendeteksian kecurangan oleh internal auditor.

- Amrizal. 2004. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor. BPKP, Jakarta.
- Anti Corruption Commitee. 2018. Jumlah Kasus Korupsi di Kota Makassar. Makassar.
- Auditors, C. I. of I. 2013. Internal audit and corrupt practices (including fraud and bribery). IIA Policy Paper.
- Bastian, I. (2006). Akuntansi sektor publik: suatu pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Devi. 2016. Teori-Teori Fraud dan pencegahan kecurangan (<http://devifitrianaaa.blogspot.co.id/2016/11/teori-teori-fraud.html>)
- Dita. 2016. Perkembangan Teori Fraud dan pencegahan kecurangan (<http://ditafalah.blogspot.co.id/2016/11/perkembangan-teori-fraud.html>)
- Ge, Li, Liu, Mc Vay. 2014. The Effect of Internal Control on Corporate Corruption: Evidence From China. *Naturat Sciences of Foundation China*, China.
- Ghozali, Imam. 2006. Statistik Nonparametrik. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Kantz, Kahn. 1978. *The Social Psychology of Organizations*. Wiley, North Carolina.
- Karlina. 2020. Sistem Pengendalian Internal dan Peran Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. *Bongaya Jurnal fo Research in Accounting*. STIEM Bongaya. Makassar
- Karo. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Kerr. 2013. Fraud-risk Factors and Audit Planning: The Effects of Auditor Rank. *Journal of Forensic & Investigative Accounting* Vol. 5, Issue 2, July - December, 2013, 5(2), pp. 48–76.
- Khan. 2012. Role of Audit in Fighting Corruption. Sudan: United Nations Mission in Sudan. Sudan.
- Koeswayo. 2016. Effect of Competence, on Internal Audit Professionals Skepticism, Implications on Regional Head of Corruption Practices (Case Study District / City in West Java Province). *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 4(5), pp. 90–109.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2013. Selenggarakan seminar nasional, KPK dorong optimalisasi aparat pengawas internal. ([www.kpk.go.id/berita/siaran-pers/1519-selenggarakan-seminar-nasional-kpk-dorong-optimalisasi-aparat-pengawas-internal](http://www.kpk.go.id/berita/siaran-pers/1519-selenggarakan-seminar-nasional-kpk-dorong-optimalisasi-aparat-pengawas-internal))
- Lelly, dkk. 2017. Does Quality of Financial Statement Affected by Internal Control System and Internal Audit?. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(2), pp. 568–573.
- Liu, Lin. 2012. Government auditing and corruption control: Evidence from China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research* 5 Elsevier, China.
- Makassar, Metro. 22 Mei 2018, Inspektorat Makassar Rutin Gelar Sosialisasi Terkait Manajemen Kebutuhan Audit. (<http://makassarmetro.com/> \_)
- Milica, Tadija. 2015. Contribution of Internal Auditing ,12, pp. 297–309.
- Millichamp, W. C. (2002). Embracing riskbased auditing in internal corporate governance. *Finance Review*. June, 17- 20.
- Mondy, Judith, Gordon. 1990. *Management and Organizational Behaviour*. Allyn and Bacon, United Kingdom

- Neu. 2010. Auditing and Corruption in the Public Sector : The Case of the Canadian Sponsorship Program. Kanada.
- Nurhasanah. 2016. Efektifitas Pengendalian Internal, audit internal, karakteristik instansi dan kasus korupsi (studi empiris di kementerian/lembaga). Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas keuangan Negara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Sukrisno. 2012. Auditing. Salemba Empat, Jakarta.
- Sunjuyo. 2013. Aplikasi SPSS untuk Smart Riset. Alfabeta, Bandung.
- Theresa, Andreas, Natariasari. 2014. Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Studi Empiris pada Perbankan di Pekanbaru. JOM FEKON Vol. 1 No. 2 Oktober 2014, Pekanbaru.
- Transparency International Indonesia (TII). 2017. Survei Persepsi Korupsi – TII; Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia. (<http://riset.ti.or.id/ipkindonesia>)
- Tribun, Timur. 31 Mei 2018, Auditor Kurang Inspektora Makassar Sebut Smart Auditing jadi Solusi. (<http://makassar.tribunnews.com>)
- Tugiman. 2006. Standar Profesional Audit Internal. Kanisius, Yogyakarta.
- Umar, Husein, 2003, Metode Riset Bisnis. Gramedia Pustaka Utama, Politeknik Pos Indonesia, Jakarta.
- Wiriyathi, Rasmini, Wirakusuma. 2014. Pengaruh Role Stressors pada Burnout Auditor dengan Kecerdasan Emosional sebagai Variabel Moderating. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 12.1 : 249-264, Bali.
- Zhang, Zhou, Zhou. 2007. audit committee quality, auditor independence, and internal control weakness. Journal of Accounting and Public Policym 26,300-327.